

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

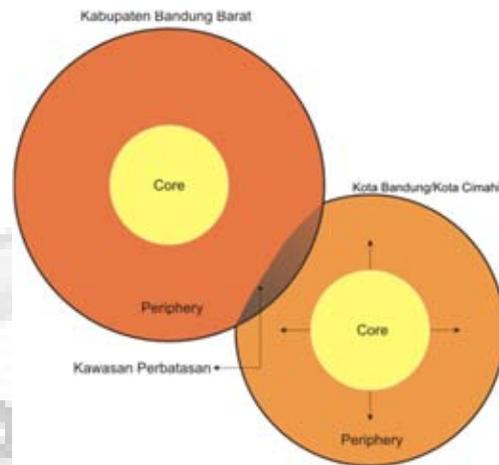
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, mulailah era baru dalam sistem pembangunan di daerah. Pada intinya otonomi daerah mengandung makna yaitu diberikannya wewenang pada Pemerintah Daerah menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur kepentingan daerah masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian besar kewenangannya pada pemerintah daerah. Dikarenakan hal tersebut maka akan terjadi peningkatan berbagai urusan pemerintahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah, tetapi karena ada beberapa keterbatasan pemerintah daerah seperti dalam segi dana dan sumber daya manusia maka dalam menyelesaikan urusan tersebut pemerintah daerah masih mengalami kesulitan. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan beberapa permasalahan, baik untuk daerah yang dilayani dan untuk daerah yang melayani, maka jika ada beberapa urusan yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu daerah tetapi daerah lain dapat memenuhinya, hal tersebut akan menimbulkan daya saing antar daerah dan bahkan akan membuat masyarakat yang kebutuhannya tidak dapat dipenuhi di daerah asalnya akan bergerak ke daerah yang dapat memenuhi kebutuhannya. Kasus tersebut banyak terjadi di daerah perbatasan, karena pemerintah daerah memiliki beberapa kendala salah satunya dalam segi dana dan jarak yang cukup jauh dari pusat pelayanan.

Ada beberapa teori dan beberapa ketentuan dalam pengembangan permukiman pada suatu daerah, diantaranya adalah Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 dan SNI 03-1733-2004 tentang Perencanaan Lingkungan Permukiman Perkotaan. Bahwa dalam setiap rencana pengembangan kawasan permukiman perlu dilengkapi dengan tersedianya sarana sosial-ekonomi dalam wujud tersedianya area pusat kegiatan/pusat pelayanan sosial ekonomi lengkap dengan beberapa sarana bagi penduduk permukiman tersebut dalam radius yang terjangkau, sesuai ketentuan. Hal ini dimaksudkan selain sebagai upaya pemenuhan kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM) bagi masyarakat.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka pemenuhan standar pelayanan minimum merupakan rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dan pemerataan pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berpatokan pada pengertian di atas maka pembangunan seharusnya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan sektoral yang bersifat sebagian saja, tetapi seharusnya pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pengembangan wilayah yang bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai sumberdaya sebagai unsur utama pembentuk ruang.

Salah satu alasan pembentukan Kabupaten Bandung Barat adalah cakupan pelayanan Kabupaten Bandung pada saat itu kurang merata karena luasnya cakupan Kabupaten Bandung, maka pada saat itu dibentuklah Kabupaten Bandung Barat. Fenomena terbentuknya Kabupaten Bandung Barat yang diharapkan adalah daerah yang sebelumnya tidak terlayani pada saat masih tergabung dalam Kabupaten Bandung menjadi dapat terlayani, namun dalam perkembangannya pembangunan di Kabupaten Bandung Barat masih sangat jauh dari harapan, karena sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat pun masih sama seperti sebelum terbentuknya Kabupaten Bandung Barat. Dikarenakan kondisinya cenderung sama seperti belum terbentuknya Kabupaten Bandung Barat maka masyarakat lebih dilayani oleh Kota Bandung yang aksesnya lebih mudah untuk dijangkau. Dalam artian pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan antara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan fasilitas sosial-ekonomi bagi suatu permukiman. Hal tersebut selain masyarakat tidak terpenuhi kebutuhannya, juga dari sisi pemerintah daerah dapat menunjukkan lemahnya kinerja pemerintah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bagi masyarakatnya.

Ditambah lagi dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perumahan permukiman di Kota Bandung dan Kota Cimahi sedangkan ketersediaan lahan semakin berkurang, maka banyak orang mencari kebutuhan tersebut ke wilayah sekitar Kota Bandung dan Kota Cimahi yaitu salah satunya adalah Kecamatan Parongpong di Kabupaten Bandung Barat yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi, hal tersebut menyebabkan lahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat cenderung beralih fungsi menjadi kawasan perumahan permukiman.



Gambar 1.1 Ilustrasi Perkembangan Kawasan Permukiman dari Kota Bandung ke Kabupaten Bandung Barat

Sumber: Hasil Pengamatan, 2013

Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan baru, dikarenakan wilayah yang dijadikan kawasan permukiman adalah desa-desa yang termasuk dalam Kawasan Bandung Utara yang mempunyai peraturan khusus untuk melakukan suatu pembangunan. Kebun-kebun yang ada telah berubah menjadi perumahan-perumahan yang mayoritas pemiliknya adalah yang bekerja di Kota Bandung. Dikarenakan fenomena yang terjadi saat ini adalah telah berkembangnya permukiman yang berada di Kecamatan Parongpong yang sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara, maka kebutuhan terhadap fasilitas sosial-ekonomi terutama terhadap kebutuhan ekonomi penduduk yang berada di kawasan tersebut akan ikut berkembang. Dengan kata lain ada standar pelayanan minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah dikarenakan ada sejumlah penduduk pendukung yang bertambah.

Mengamati perkembangan Kawasan Bandung Utara dengan kendala seperti yang telah diuraikan di atas maka harus ada suatu pola pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan fasilitas sosial-ekonomi pada Kawasan Bandung Utara di wilayah Kecamatan Parongpong. Dengan adanya suatu pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi maka diharapkan bahwa kebutuhan masyarakat Kecamatan Parongpong di Kawasan Bandung utara dapat terpenuhi tanpa mengubah fungsinya sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara dengan kendala yang terdapat di dalamnya. Saat ini beberapa desa yang ada di Kecamatan Parongpong yang jauh dari Desa Cihanjuang Rahayu sebagai pusat

pelayanannya, lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya mayoritas pergi ke Kota Bandung atau ke Kota Cimahi karena di sana terdapat fasilitas sosial-ekonomi yang jaraknya lebih dekat jika dibandingkan ke Desa Cihanjuang Rahayu sebagai pusat pelayanan. Selain itu moda transportasi yang tersedia lebih banyak dan secara kualitas lebih baik dibandingkan yang ada di Kecamatan Parongpong, sehingga mayoritas masyarakat Kecamatan Parongpong memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas sosial-ekonomi ke Kota Bandung atau Kota Cimahi.

Dengan mengetahui fenomena berkembangnya kawasan permukiman di Kecamatan Parongpong yang mendorong berkembangnya perekonomian di daerah tersebut dan Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara dengan beberapa kendala yang ada di dalamnya, maka perlu adanya penelitian terhadap suatu pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong yang diharapkan kebutuhan masyarakat Kecamatan Parongpong di Kawasan Bandung utara dapat terpenuhi tanpa mengubah fungsinya sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat perkembangan Kecamatan Parongpong ke arah kegiatan perumahan permukiman, yang mendorong berkembangnya kebutuhan terhadap fasilitas sosial-ekonomi di daerah tersebut dan Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara dengan beberapa kendala yang ada di dalamnya, maka perlu adanya suatu pola pelayanan dalam rangka pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong agar kebutuhan masyarakat Kecamatan Parongpong di Kawasan Bandung utara dapat terpenuhi tanpa mengubah fungsinya mengingat Kecamatan Parongpong termasuk ke dalam KBU. Melihat dari penjabaran dan latar belakang diatas, garis besar masalah yang akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pelayanan eksisting dan keterkaitan fasilitas sosial-ekonomi pada Kawasan Bandung Utara di wilayah Kabupaten Bandung Barat (Kecamatan Parongpong) dilihat dari jarak jangkauan dan ketersediaannya?
2. Bagaimana pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong untuk mengatasi kebutuhan penduduknya terhadap pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi tanpa merubah fungsinya sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Melihat dari rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari studi ini adalah merumuskan pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong sebagai Kawasan Lindung Bandung Utara, agar kebutuhan masyarakat Kecamatan Parongpong di Kawasan Bandung Utara terhadap fasilitas sosial-ekonomi dapat terpenuhi tanpa mengubah fungsinya sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara dengan kendala yang terdapat di dalamnya. Adapun sasaran dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Teridentifikasi pola pelayanan eksisting fasilitas sosial-ekonomi pada Kawasan Bandung Utara di wilayah Kawasan Bandung Barat dilihat dari jarak jangkauan dan ketersediaannya.
2. Terbentuknya pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi di Kecamatan Parongpong untuk mengatasi kebutuhan penduduknya terhadap pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi tanpa merubah fungsinya sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengayaan ilmu pengetahuan dibidang perencanaan wilayah, khususnya dalam hal pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi (sarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) di Kecamatan Parongpong sebagai Kawasan Lindung Bandung Utara.

1.5 Ruang Lingkup

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, lebih jelasnya dapat di lihat pada sub sub bab di bawah ini.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

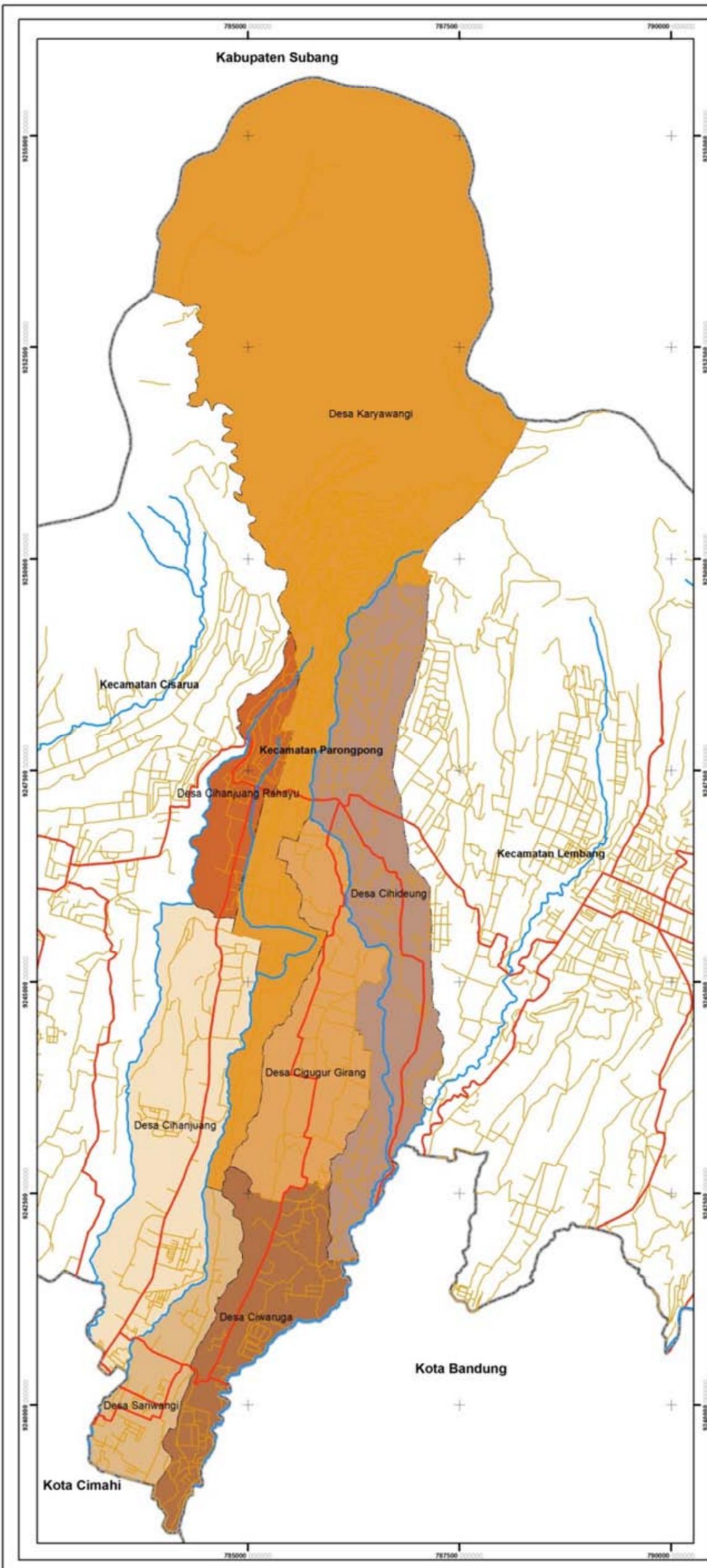
Ruang lingkup wilayah studi mengenai pengembangan fasilitas sosial-ekonomi di Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari Kawasan Lindung Bandung Utara, meliputi desa-desa di Kecamatan Parongpong di Kabupaten Bandung Barat, lihat Gambar 1.1. Peta Wilayah Studi. Pemilihan lokasi penelitian dipertimbangkan terhadap: (1) kondisi lapangan yang menunjukkan selain tingkat perkembangan pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman yang cukup pesat; dan (2) sebagian dari desa-desa di wilayah ini menurut ketentuan yang ada termasuk ke dalam Kawasan Bandung Utara

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mengenai pengembangan fasilitas sosial-ekonomi di Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara, adalah:

1. Mengidentifikasi pola penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Parongpong.
2. Mengkaji RTRW Kabupaten Bandung Barat untuk mengetahui pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi yang ada di Kecamatan Parongpong.
3. Mengkaji kebijakan yang terkait dengan Kawasan Bandung Utara untuk mengetahui arah pengembangan pembangunan yang ada di Kawasan Bandung Utara.
4. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat Kecamatan Parongpong terhadap pemenuhan fasilitas sosial-ekonomi tanpa mengubah fungsinya sebagai Kawasan Bandung Utara.
5. Mengidentifikasi pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi eksisting pada Kawasan Bandung Utara di Kecamatan Parongpong dilihat dari jarak jangkauan dan ketersediaannya.
6. Mengidentifikasi pola pergerakan penduduk Kecamatan Parongpong dalam memenuhi kebutuhan terhadap fasilitas sosial-ekonomi.

Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat di Kawasan Bandung Utara terhadap fasilitas sosial-ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-harinya maka diharapkan didapatkan pola pelayanan fasilitas sosial-ekonomi untuk menangani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Parongpong sebagai bagian dari Kawasan Bandung Utara terhadap fasilitas sosial-ekonomi, mengingat Kawasan Bandung Utara mempunyai fungsi khusus sebagai kawasan konservasi dan kawasan budidaya yang pembangunannya sangat dibatasi.



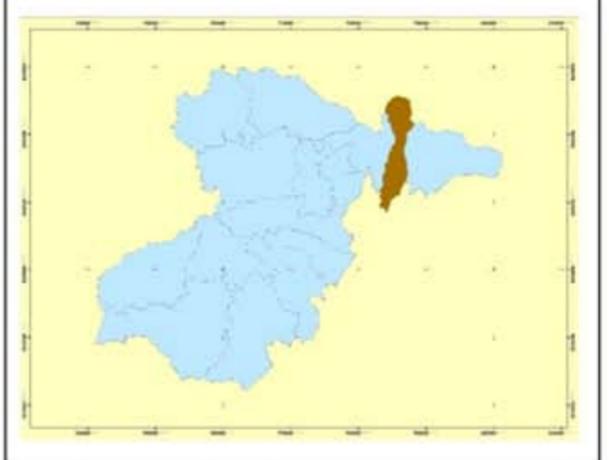
KECAMATAN PARONGPONG

POLA PELAYANAN FASILITAS SOSIAL-EKONOMI
DI KECAMATAN PARONGPONG SEBAGAI
KAWASAN LINDUNG BANDUNG UTARA

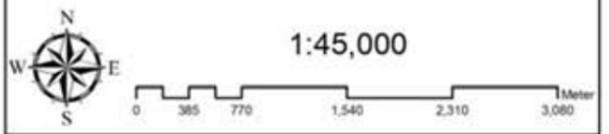
GAMBAR 1.2
PETA WILAYAH STUDI

- Legenda:**
- Garis Kontur
 - Sungai
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lokal
 - Batas Kota/Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Desa Cigugur Girang
 - Desa Cihanjuang
 - Desa Cihanjuang Rahayu
 - Desa Cihideung
 - Desa Ciwaruga
 - Desa Karyawangi
 - Desa Sariwangi

Sumber:
- Peta RBI Bakosurtanal, 2011
- Hasil Digitasi, 2014



Oleh:
Luthfi Fitriansyah
10070309006



 **PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
2014 M/1435 H

1.6 Metodologi

1.6.1 Metode Pendekatan Studi

Perencanaan merupakan suatu proyeksi yang diharapkan terjadi dalam jangka waktu tertentu di masa depan, sehingga para perencana perlu menghitung dan menganalisa serta membuat asumsi-asumsi agar proyeksi tersebut dapat tercapai. Perencanaan secara implisit mengandung tiga pilar yaitu berhubungan dengan hari depan, menyusun seperangkat kegiatan secara sistematis, dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Hal-hal tersebut diwujudkan dan dirancang melalui sebuah konsep atau pendekatan yang merupakan suatu bentuk buah pikiran yang dihasilkan dari suatu proses studi. Pada metode pendekatan studi ini lebih menekankan kepada deskriptif eksplanatif dan secara spasial. Dalam deskriptif eksplanatif lebih mengemukakan kata-kata dari upaya pengolahan data agar dapat digambarkan secara jelas dalam mengekspos kemampuan dan dapat dibandingkan dengan asumsi sebelumnya pada bidang pendidikan untuk memperoleh keterangan dan informasi. Sedangkan pada pendekatan secara spasial lebih mempertimbangkan dalam aspek-aspek keruangan seperti kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam suatu kawasan yang mengacu pada standar dan peraturan yang ada. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah dengan menggunakan pendekatan perencanaan sentralistik atau sering disebut dengan *top down*.

Dalam perencanaan sentralistik atau *top down*, keseluruhan proses perencanaan suatu wilayah dibawah badan perencanaan pusat sebagai pengendali setiap aspek pembangunan. Metode pendekatan ini bersumber dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Bentuk campur tangan pemerintah dapat dikategorikan atas kebijakan yang bersifat mengatur, menetapkan, dan mengarahkan perencanaan yang telah dirancang harus berdasarkan atas kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun pemerintah Kota Bandung. Pada proses perencanaan ini peran pemerintahlah yang mengambil seluruh keputusan atas perencanaan yang akan diterapkan di Kabupaten Bandung Barat maupun Kota Bandung. Dimana masyarakat sebagai inspirasi pemerintah untuk mewujudkan suatu perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi tercapainya stabilitas kehidupan yang baik antara masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan yang akan direncanakan oleh pemerintah.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dapat terlaksana apabila proses survey dan kompilasi datanya lengkap dan akurat. Kelengkapan data tersebut dapat diperoleh melalui metode pengumpulan data yang terbagi menjadi dua jenis yaitu metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. Kedua metode ini sangat berbeda dilihat dari cara memperoleh datanya.

1.6.2.1 Metode Pengumpulan Data Primer

Metode survey primer ini diperoleh dari hasil observasi lapangan secara langsung dengan menggunakan beberapa alat survey yang meliputi wawancara kepada masyarakat dan instansi yang terkait, memberikan beberapa pertanyaan kepada masyarakat setempat mengenai wilayah studi melalui lembar kuesioner, pemotretan dan perekaman wilayah studi (visualisasi). Data primer merupakan data yang diperoleh dari survey langsung di daerah studi dengan teknik observasi lapangan yang merupakan pengamatan langsung ke daerah studi sehingga nantinya dapat menggambarkan keadaan eksisting daerah studi yang berupa wawancara dan observasi lapangan.

- 1 Wawancara dan Penyebaran Kuesioner pada penelitian ini dilakukan secara bersamaan. Sehingga pada saat responden sedang atau setelah mengisi koesioner peneliti mewawancarai responden sesuai kebutuhan data yang diperlukan. Hal tersebut dilakukan karena mempertimbangkan waktu yang terbatas dan responden yang cukup banyak yaitu sejumlah 100 responden yang berdasarkan perhitungan penentuan jumlah sampel menurut metode slovin.
- 2 Observasi lapangan yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan wilayah secara fisik, fasilitas, kegiatan sosial budaya, potensi dan permasalahan eksisting yang terdapat di daerah studi. Observasi lapangan ini juga berguna untuk memverifikasi data sekunder yang telah di dapat sebelumnya. Dalam kegiatan observasi lapangan, terdapat kegiatan visualisasi atau pemotretan.

1.6.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi yang terkait dan data telah terdokumentasi dengan menggunakan teknik :

1. *Studi kepustakaan* yaitu mencari data yang terdapat pada instansi pemerintahan, bahan bacaan dari literatur buku-buku yang sesuai dengan masalah studi.

2. *Studi literatur* dilakukan dengan mengunjungi perpustakaan-perpustakaan dan mencari buku-buku, majalah dan sebagainya yang menunjang kegiatan survey di lapangan.

Instansional yaitu pengumpulan data yang erat kaitannya dengan masalah studi yang berasal dari instansi-instansi terkait seperti : Kantor Bappeda, BPS (Biro Pusat Statistik), Kantor Kecamatan, Kantor Desa, dan lain sebagainya.

1.6.2.3 Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (rumah tangga) yang terdapat di wilayah Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan data statistik *Profil Kecamatan Parongpong, 2011*, jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Parongpong adalah 25.634 KK. Sebagai sampel akan diambil secara proporsional secara jumlah KK (rumah) dan luas wilayah (sebaran) pada masing-masing desa wilayah penelitian. Penentuan jumlah sampel akan digunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Besaran Sampel

N = Besaran Populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (% kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel). Dalam penelitian ini nilai kritis diambil 10%.

Dengan jumlah popupasi sebesar 25.634 KK, maka diperoleh jumlah sampel sebesar: $25.634 / \{1 + (25.634 \times 0,10^2)\} = 99,61$ KK. Dari hasil perhitungan tersebut maka dibulatkan menjadi 100 KK. Jumlah sampel ini akan disebar secara proporsional secara ruang berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dengan persentase distribusi sampel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Populasi dan Sampel

Nama Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Sampel
	Laki-Laki	Perempuan			
Desa Karyawangi	4.150	3.936	8.086	2.511	10
Desa Cihanjuang Rahayu	5.696	5.587	11.283	3.326	13
Desa Cigugur Girang	7.301	6.690	13.991	4.134	14
Desa Cihanjuang	8.437	8.214	16.651	4.918	20
Desa Cihideung	6.259	6.667	12.926	4.041	15
Desa Ciwaruga	6.208	6.191	12.399	3.384	13
Desa Sariwangi	8.126	7.962	16.088	4.022	15

Sumber: *Monografi Kecamatan, 2013*

1.6.3 Metode Analisis

Pengolahan data penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu metode kualitatif yang didasari oleh sudut pandang atau perspektif, yang beranggapan setiap fenomena merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa faktor saja. Selain itu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan beberapa kriteri yang dapat mendukung terhadap studi ini. Lebih jelasnya mengenai metode analisis kualitatif dan kuantitatif pada penelitian ini dapat dilihat pada sub bab dibawah ini.

1.6.3.1 Metode Analisis Kualitatif

Metode analisis kualitatif yang digunakan pada penelitian ini berupa analisis data hasil wawancara, analisis data hasil observasi lapangan, analisis data peta dengan menggunakan teknik superimpose, dan analisis kebijakan. Analisis data peta dilakukan untuk mengetahui delineasi area lahan yang termasuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berdasar kepada Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara dan No. 58 Tahun 2011 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Sedangkan dalam analisis kebijakan membahas mengenai kebijakan-kebijakan dimulai dari lingkup nasional, Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi terkait dengan kebijakan RTRW masing-masing daerahnya.

1.6.3.2 Metode Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain adalah analisis kebutuhan sarana permukiman di wilayah penelitian dan analisis statistik hasil survey kuesioner terkait dengan bentuk sistem dan/atau pola layanan sarana fasilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang ada saat ini di lapangan. Dalam menganalisis kebutuhan fasilitas sosial-ekonomi baik jenis, jumlah, dan sebarannya, digunakan metode analisis berdasarkan standar perencanaan menurut SNI 03-1733-2004 tentang Perencanaan Lingkungan Permukiman Perkotaan. Sedangkan analisis kuantitatif dari hasil kuesioner teknik analisis yang digunakan adalah metode statistik persentase (%). Alasan menggunakan

teknik persentase ini adalah dikarenakan data yang digunakan ordinal, data yang didapat bersifat kuantitatif dan data statistik berbentuk nonparametrik.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Pola Pelayanan Fasilitas sosial-ekonomi Di Kecamatan Parongpong Sebagai Kawasan Lindung Bandung Utara, dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.

1.8 Sistematika Pembahasan

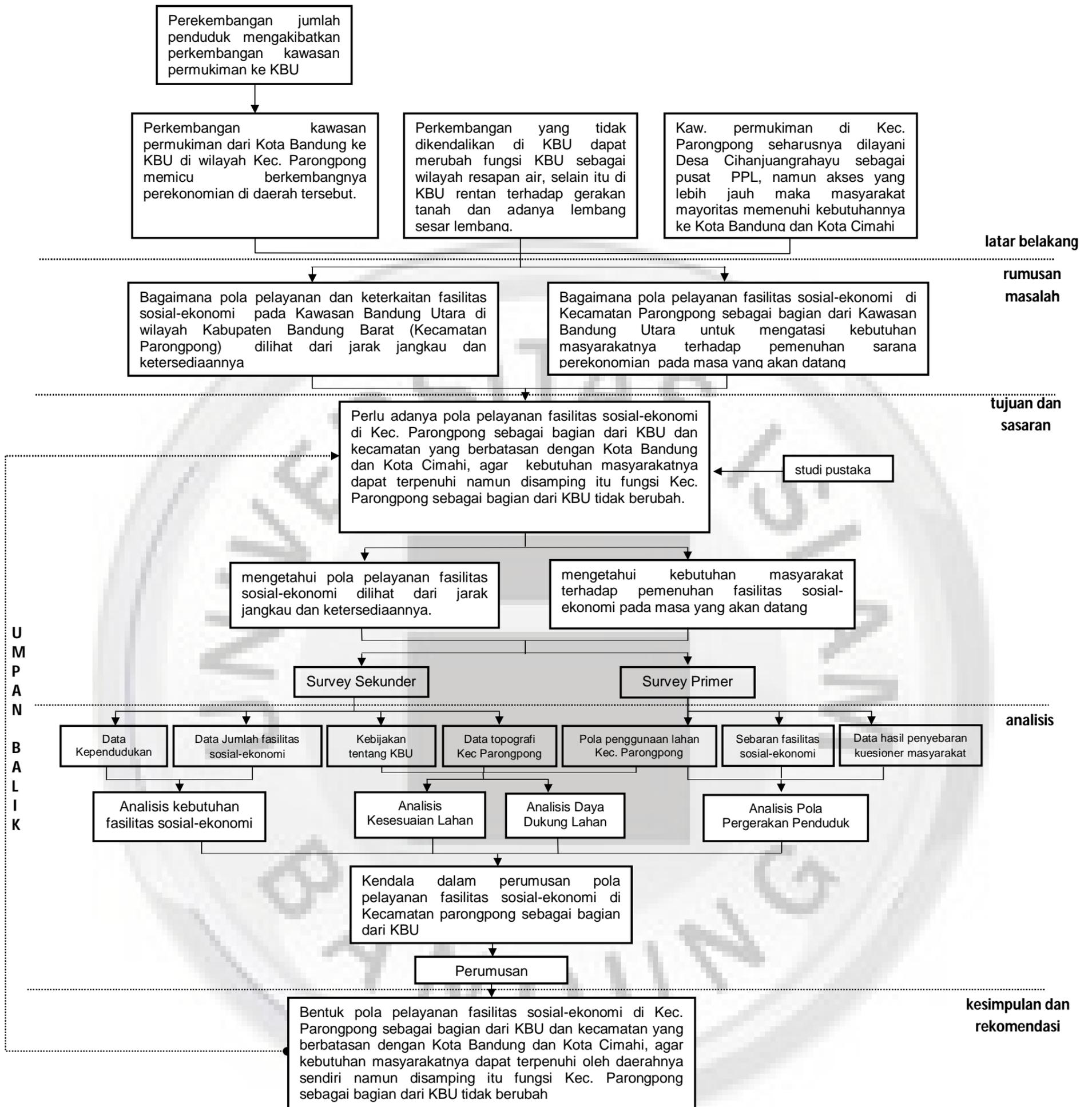
Sistematika pembahasan dapat mempermudah dalam menelusuri dan memahami Laporan Hasil Pola Pelayanan Fasilitas Sosial-Ekonomi Di Kecamatan Parongpong Sebagai Kawasan Lindung Bandung Utara, maka dalam penyajian menggunakan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan studi, ruang lingkup materi dan wilayah, metodologi serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Uraian tentang teori-teori dalam pengelolaan kawasan yang mempunyai fungsi sebagai kawasan yang melindungi kawasan bawahannya. Bab ini juga membahas mengenai membahas mengenai peraturan-peraturan pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat mengenai Kawasan Bandung Utara.

Bab III Data dan Analisis. Gambaran tentang kondisi eksisting pada Kawasan Bandung Utara di wilayah Kecamatan Parongpong. Selanjutnya dilakukan analisis pola pelayanan di Kecamatan Parongpong dan analisis kebutuhan fasilitas sosial-ekonomi yang ada pada Kawasan Bandung Utara di wilayah Kecamatan Parongpong.

Bab IV Pembahasan, Kesimpulan, Dan Rekomendasi. Membahas mengenai pola pelayanan yang harus diterapkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas sosial-ekonomi pada Kawasan Bandung Utara di wilayah Kecamatan Parongpong. Selain itu berisikan juga ringkasan dari bab-bab sebelumnya yang meliputi ulasan umum penelitian, pokok-pokok temuan penelitian, dan rekomendasi.



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Identifikasi Pola Pelayanan Fasilitas Sosial-Ekonomi Di Kec. Parongpong Sebagai Kawasan Lindung Bandung Utara
 Sumber: Hasil Analisis, 2014